

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Khususnya, investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) ini menjadi kunci penting. Dengan adanya FDI, kapasitas produksi bisa meningkat, transfer teknologi jadi lebih cepat, dan yang tak kalah penting, lapangan kerja baru pun bisa tercipta. (Todaro & Smith, 2020). Pemerintah perlu menjaga iklim investasi tetap kondusif, karena menurut data Bank Indonesia (2023), arus investasi asing ke Indonesia meningkat 8,5% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini utamanya masuk ke sektor infrastruktur, manufaktur, dan teknologi (Bank Indonesia, 2023). Keberadaan investasi asing membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri lokal (World Bank, 2022). Penanaman Modal Asing (PMA) sangat dibutuhkan untuk mempercepat laju pembangunan ekonomi nasional. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti mendorong industrialisasi, membangun modal *overhead* (yaitu infrastruktur penunjang), serta yang paling krusial, menciptakan lapangan kerja baru. Selain membawa serta modal finansial dan teknologi permesinan, modal asing juga turut

mentransfer keterampilan teknis yang sangat berharga.

PMA pun berperan dalam membuka akses ke daerah-daerah terpencil, mengelola sumber daya baru, dan berani menanggung risiko yang melekat pada proyek-proyek perintis. Tak hanya itu, PMA juga mampu mendorong terjalinnya kemitraan dengan pengusaha lokal, membantu mengatasi masalah neraca pembayaran, menekan tekanan inflasi, memfasilitasi modernisasi masyarakat, serta memperkuat kapabilitas sektor publik maupun swasta. (Jhingan, 2013). Berdasarkan karakteristik pelakunya, investasi dapat lebih lanjut dikelompokkan. Yang pertama adalah investasi publik. Investasi ini dilakukan oleh negara atau pemerintah dengan tujuan membangun berbagai sarana dan prasarana yang esensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Sifatnya non-profit, artinya tidak berorientasi pada perolehan keuntungan finansial. Contohnya meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit, serta beragam fasilitas publik lainnya.

Jenis yang kedua adalah investasi swasta. Berbeda dari investasi publik, investasi ini dilakukan oleh individu atau para pengusaha dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, investasi swasta sering disebut sebagai investasi dengan orientasi profit. Pelaku investasi jenis ini dapat berasal dari domestik maupun asing, yang kemudian dikategorikan lagi menjadi DII (*Domestic Indirect Investment*), FII (*Foreign Indirect Investment*), DDI (*Domestic Direct Investment*), maupun FDI (*Foreign Direct Investment*). (Noor, 2007). Menurut Harrod dan Domar (1999), investasi sangat berperan

penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ini karena investasi punya dua peran utama: pertama, ia menciptakan pendapatan melalui permintaan investasi, artinya ada aktivitas ekonomi saat investasi dilakukan. Kedua, investasi meningkatkan kapasitas produksi dengan cara menambah stok modal, yang berasal dari penawaran investasi. (Fivie & dkk, 2019). Salah satu wujud investasi asing yang penting adalah penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment (FDI)*. Bentuk investasi ini melibatkan masuknya aliran modal dari luar negeri dalam rupa investasi langsung. Contohnya meliputi pembangunan fasilitas produksi seperti pabrik, pengadaan barang modal dan lahan, serta pembelian bahan baku, yang kesemuanya dilakukan oleh entitas asing di negara tempat investasi diterima. (Tiwari & Mutascu, 2011).

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan faktor krusial dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi suatu negara. Perannya sangat terasa melalui industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur yang vital. PMA tidak sekadar membawa suntikan modal finansial, tetapi juga mentransfer teknologi terkini, membuka akses ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau, serta berani menanggung risiko awal dalam perintisan usaha baru. Di samping itu, PMA juga memiliki dampak positif lain yang tak kalah penting. Ini mendorong terjalinnya kemitraan dengan pengusaha lokal, berkontribusi dalam perbaikan neraca pembayaran negara, membantu menekan inflasi, memfasilitasi modernisasi

masyarakat, dan secara keseluruhan memperkuat sektor publik maupun swasta. (Jhingan, 2013).

Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), sebuah perusahaan terkemuka dari Filipina, baru-baru ini menuntaskan investasi strategis di Indonesia. Langkah ini diwujudkan melalui akuisisi mayoritas saham PT Nusantara Infrastructure Tbk (NI). Sebagai perusahaan infrastruktur swasta di Indonesia, NI memiliki portofolio yang beragam, meliputi pengembangan dan pengelolaan jalan tol, penyediaan air bersih, sektor energi terbarukan, periklanan, serta manajemen parkir. Investasi asing memiliki peran krusial sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Investasi Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) asal Filipina melalui anak perusahaannya di Indonesia berperan penting dalam pembangunan infrastruktur Sulawesi Selatan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui PT Makassar Metro Network (sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara) yang berada di bawah PT Margautama Nusantara dan Nusantara Infrastructure Tbk, MPTC membangun Jalan Tol Layang AP Pettarani atau Tol Seksi III di Makassar dan jalan tol Makassar New Port (PT Makassar Metro Network & PT Makassar Airport Network, 2024). Proyek ini bertujuan mengurangi kemacetan, meningkatkan kelancaran transportasi, serta memperkuat sistem logistik dan mobilitas warga (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulsel, 2018). Hal ini sangat sejalan dengan visi *ASEAN Economic*

Community (AEC), yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas dan integrasi ekonomi di seluruh kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh konkret, investasi dari *Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)* asal Filipina secara langsung berkontribusi pada pengembangan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Kontribusi ini tidak hanya meningkatkan daya saing regional, tetapi juga memfasilitasi kelancaran arus barang, jasa, dan investasi, sebuah capaian yang selaras dengan tujuan besar AEC.

Penting untuk dipahami bahwa *ASEAN Economic Community (AEC)* sendiri merupakan salah satu pilar utama ASEAN yang didesain untuk mewujudkan integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Secara garis besar, AEC berupaya membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi, meningkatkan daya saing regional secara signifikan, sekaligus memperdalam integrasi ekonomi kawasan dengan pasar global (Permatasari, 2020). Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *Asean Economic Community (AEC)* memiliki visi untuk membentuk sebuah kawasan ekonomi yang lebih terintegrasi, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sejak implementasinya di tahun 2015, AEC telah membawa dampak nyata, terutama dalam memfasilitasi perdagangan bebas, arus investasi, serta pergerakan tenaga kerja terampil di seluruh kawasan ASEAN. Dengan keberadaan AEC ini, harapan besarnya adalah ASEAN dapat semakin memperdalam integrasi ekonomi di tingkat regional sekaligus meningkatkan daya saingnya di kancah global. (Permatasari, 2020). Ekonomi regional yang

terintegrasi sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan yang stabil. Ini dicapai dengan cara memfasilitasi perdagangan, menarik investasi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Lebih dari itu, keterhubungan ini juga memperkuat kapasitas kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan global dan tren-tren utama yang muncul. Upaya mencapai tujuan ini melibatkan beberapa strategi penting. Pertama, kita perlu memperdalam integrasi pasar tunggal. Kedua, meningkatkan komitmen terhadap perdagangan barang, serta mengatasi hambatan *non-tarif* secara lebih efektif. Selanjutnya, penting juga untuk memperluas perdagangan jasa dan memperlancar aliran investasi, tenaga kerja terampil, pelaku bisnis, serta modal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi regional yang lebih tangguh dan adaptif. (Widiyana & Djatmiko, 2019).

Investasi yang dilakukan oleh *Metro Pacific Tollways Corporation* (MPTC) dari Filipina di sektor infrastruktur Sulawesi Selatan punya peran penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Dengan mengembangkan dan mengelola jaringan jalan tol, MPTC membantu memperlancar konektivitas, mendorong investasi baru, serta menciptakan lapangan kerja di sana. Lebih dari itu, investasi ini juga selaras dengan upaya integrasi ekonomi ASEAN. Secara khusus, langkah ini berkontribusi pada penguatan daya saing daerah serta peningkatan efisiensi distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Selain melalui *ASEAN Economic Community* (AEC), upaya integrasi ekonomi di kawasan ini juga ditopang oleh *ASEAN Investment Area*

(AIA). AIA sendiri adalah sebuah inisiatif yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan investasi yang lebih terbuka dan kompetitif di Asia Tenggara. Secara spesifik, AIA dirancang untuk meningkatkan arus investasi langsung asing (FDI) ke wilayah ASEAN.

Ini dilakukan dengan menghilangkan berbagai hambatan investasi, mempromosikan transparansi, serta mendorong liberalisasi kebijakan investasi, termasuk pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur. Inisiatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan arus investasi antarnegara anggota (intra-ASEAN) dan menarik lebih banyak investasi asing ke negara-negara di kawasan tersebut. (ASEAN Secretariat, 1998). ASEAN Investment Area (AIA) dan ASEAN Economic Community (AEC) adalah dua inisiatif penting yang saling terkait erat dalam upaya ASEAN mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ini. AIA, yang didirikan berdasarkan *Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* pada tahun 1998, berupaya menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif dan terbuka di Asia Tenggara. Ini dilakukan dengan meniadakan berbagai hambatan investasi serta mempromosikan kebijakan yang transparan dan lebih liberal. Sementara itu, AEC, yang diresmikan pada tahun 2015, memiliki cakupan tujuan yang lebih luas. Tujuannya adalah menjadikan ASEAN sebagai satu pasar tunggal dan basis produksi yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih leluasa. Dengan demikian, jelas bahwa AIA berfungsi sebagai komponen vital dalam pilar AEC,

khususnya dalam membentuk iklim investasi yang kondusif. Hal ini krusial untuk meningkatkan arus investasi langsung asing (FDI) di seluruh kawasan (Jones day, 2016). Investasi yang dilakukan oleh MPTC asal Filipina di Sulawesi Selatan dapat kita lihat sebagai contoh nyata implementasi AEC (*Asean Economic Community*) dan AIA (*Asean Investment Area*).

Investasi ini secara spesifik berfokus pada peningkatan investasi antar-negara anggota ASEAN, terutama di sektor infrastruktur. Berkat adanya kebijakan AEC, investasi di bidang infrastruktur menjadi lebih mudah terealisasi karena adanya upaya integrasi ekonomi yang lebih erat. Sementara itu, melalui AIA, berbagai hambatan investasi diminimalisir guna mendorong lebih banyak aliran modal dari sesama negara ASEAN. Dengan masuknya investasi ini, pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan berpotensi berkembang lebih pesat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, selaras dengan visi integrasi ekonomi ASEAN. Pada akhirnya, upaya ini juga sejalan dengan kepentingan nasional, yang salah satu fokus utamanya adalah mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang kokoh.

Kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental bagi setiap negara. Intinya adalah bagaimana menjamin kesejahteraan, keamanan, dan kemakmuran rakyatnya. Di Indonesia, gagasan ini tercermin begitu jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea

keempat, yang menggarisbawahi komitmen untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara lebih rinci, aspek-aspek utama kepentingan nasional ini mencakup keamanan, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. (Meitty Josephin Balontia, 2021).

Melalui kemitraan strategis dengan PT Nusantara Infrastructure Tbk, yang merupakan anak perusahaannya di Indonesia, MPTC menunjukkan komitmennya untuk memperbesar investasi pada sektor jalan tol di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan memperluas jaringan jalan tol yang sudah ada, tetapi juga untuk memperkuat fondasi keuangan perusahaan demi mendukung rencana ekspansi bisnis di kemudian hari. (Konstruksi Media, 2024). Investasi yang dilakukan oleh *Metro Pacific Tollways Corporation* (MPTC) dari Filipina, melalui entitas anak perusahaannya di Indonesia, memainkan peran vital dalam pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini secara spesifik akan mengkaji peran investasi asing yang dilakukan oleh *Metro Pacific Tollways Corporation* (MPTC) Filipina dalam konteks pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Fokus utama studi ini adalah menganalisis

bagaimana dampak investasi MPTC tersebut berkontribusi pada pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya peningkatan pembangunan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan.

Merujuk pada batasan tersebut, penulis mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme investasi yang dilakukan oleh *Metro Pacific Tollways Corporation* (MPTC) Filipina dalam pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimana dampak investasi MPTC terhadap pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini dirancang berdasarkan tujuan dan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian memiliki ekspektasi dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan mekanisme investasi yang dilakukan oleh *Metro Pacific Tollways Corporation* (MPTC) dalam pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan

- 2) Untuk mengetahui dampak investasi MPTC terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis kepada lingkungan akademik dan khayalak umum. Manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai peran investasi asing langsung (FDI) dalam pembangunan infrastruktur di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi terkait investasi infrastruktur dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menggunakan konsep Kepentingan Nasional dan *Foreign Direct Investment* (FDI), penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika investasi asing dan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

- 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, serta pelaku usaha dalam memahami bentuk dan mekanisme investasi asing dalam

sektor infrastruktur. Dengan mengetahui dampak investasi *Metro Pacific Tollways Corporation* (MPTC) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menarik investasi asing di sektor infrastruktur. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu investor dalam memahami prospek investasi di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga dapat meningkatkan kerja sama investasi di masa mendatang.

D. Kerangka Konseptual

1. Kepentingan Nasional

Menurut Donald E. Nuechterlein (1979), kepentingan nasional mencerminkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan sebuah negara saat berhubungan dengan pihak luar. Ia menekankan pentingnya memahami perbedaan antara dinamika dalam negeri dan tekanan dari lingkungan internasional. Kepentingan nasional, menurutnya, bukan hanya milik segelintir elit, tapi mewakili kebutuhan seluruh masyarakat negara tersebut. Dalam pandangan Donald E. Nuechterlein, kepentingan nasional terbagi ke dalam empat aspek utama. Pertama, kepentingan pertahanan yang menyangkut perlindungan warga dan wilayah dari

ancaman luar. Kedua, kepentingan ekonomi yang mendorong kerja sama internasional demi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, kepentingan tatanan dunia yang berfokus pada stabilitas sistem global agar tetap menguntungkan. Terakhir, kepentingan ideologi yang menjaga nilai-nilai yang diyakini bangsa. Nuechterlein juga menekankan pentingnya memahami seberapa besar intensitas kepentingan suatu negara terhadap isu internasional. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor seperti lokasi geografis, struktur pemerintahan, hubungan dagang, hingga sejarah diplomatik. Dengan memahami faktor-faktor ini, negara dapat merespons situasi global dengan bijak dan tetap menjaga kepentingannya. Singkatnya, kepentingan nasional lahir dari kebutuhan mendasar negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, militer, dan sosial-budaya (Prasetyo, Istislam, & Hamidah, 2021). Dalam konteks investasi infrastruktur, masuknya investor asing seperti Metro Pacific Toll Corporation (MPTC) mencerminkan dinamika kepentingan nasional Indonesia. Kehadiran mereka bertujuan memperkuat ekonomi dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Secara ekonomi, baik investasi lokal maupun asing diharapkan mendorong pertumbuhan. Sementara itu, dari sisi kepentingan nasional, investasi diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, investor tentu menanamkan modal untuk memperoleh keuntungan. Karena itu, pemerintah perlu mampu menyeimbangkan antara kebutuhan

pembangunan dan kepentingan investor, agar investasi yang masuk benar-benar mendukung pembangunan tanpa merugikan kedua belah pihak (Surya & Wirabrata, 2010). Kepentingan nasional merupakan hasil keputusan para pembuat kebijakan, sehingga tiap negara bisa memiliki kepentingan yang berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain. Secara sederhana, kepentingan nasional mencakup segala hal yang dianggap bermanfaat bagi suatu bangsa (Yani, Y., & dkk., 2017).

Kepentingan nasional adalah tujuan utama negara dalam menghadapi tantangan. Dalam investasi infrastruktur, hal ini mencakup keamanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (Rudy, 2002). Investasi asing seperti *Metro Pacific Toll Corporation (MPTC)* di Sulawesi Selatan berperan strategis dalam memperkuat kepentingan nasional melalui pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Lewat kerja sama internasional, Indonesia mendorong iklim investasi yang *conducive, fair, dan legally certain*, dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional (Salim, 2024). Dalam upaya mengembangkan infrastruktur, Perusahaan lokal Indonesia telah menjalin kemitraan penting dengan *Metro Pacific Toll Corporation (MPTC)* dari Filipina.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi pembangunan Sulawesi Selatan dan sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang mendorong investasi asing untuk mempercepat pembangunan

infrastruktur. Investasi *Metro Pacific Toll Corporation (MPTC)* diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing regional. Penelitian ini mengkaji investasi MPTC melalui pendekatan kepentingan nasional, yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat ekonomi, memperlancar distribusi, dan mendorong sektor strategis seperti perdagangan, logistik, dan pariwisata. Lebih dari sekadar ekonomi, investasi ini juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Keterlibatan *MPTC* di Sulawesi Selatan pun menjadi bagian dari upaya Indonesia mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat daya saing wilayah secara menyeluruh.

2. *Foreign Direct Investment*

Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) adalah proses ketika perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya pada perusahaan di negara lain, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Misalnya, saat perusahaan asing membuka fasilitas produksi di Indonesia, itu merupakan bentuk FDI. Perusahaan seperti ini biasanya disebut *Multinational Enterprises (MNEs)* atau perusahaan multinasional (Jones & Wren, 2006). Investasi Asing Langsung (FDI) terjadi saat investor dari suatu negara mengakuisisi dan mengelola aset di negara lain, dengan tujuan memperoleh kontrol. Berbeda dari

investasi portofolio yang bersifat pasif, FDI melibatkan keterlibatan langsung dalam operasional perusahaan, termasuk transfer sumber daya dan pengambilan keputusan. Investor cenderung mempertahankan bisnis yang produktif dan melepas yang tidak menguntungkan (Bende & Nabende, 2002). Menurut Pasal 1 Ayat 3 UU No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan investasi oleh penanam modal asing di Indonesia. Investasi ini dapat dilakukan dengan modal asing sepenuhnya atau melalui kerja sama dengan penanam modal dalam negeri (Anisa, 2020) Di Indonesia, investasi asing bisa muncul dalam dua bentuk utama, yakni investasi portofolio dan investasi langsung (Jufrida, Syechladad, & Nasir, 2016). FDI membantu mengurangi risiko kepemilikan melalui diversifikasi, sekaligus mendorong tata kelola, akuntansi, dan hukum yang lebih baik. Aliran modal asing juga membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan, karena modal cenderung bergerak ke negara yang lebih stabil dan menguntungkan (Rasyidin, 2010).

Di Indonesia, FDI dan PMA merujuk pada investasi asing dengan kepemilikan atau kendali atas perusahaan. FDI, menurut Bank Indonesia, berasal dari non-residen dengan saham minimal 10% dan aktivitas ekonomi di negara asal. Sementara PMA menekankan asal kewarganegaraan investor, sesuai UU No. 25 Tahun 2007. (Kementerian Investasi dan Hiirisasi/BKPM, 2023). Investasi asing

adalah sumber pendanaan eksternal strategis yang mendukung pembangunan nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Selain membawa modal, investasi ini juga mendorong transfer pengetahuan dan pengembangan SDM, serta berkontribusi langsung pada pelaksanaan rencana pembangunan nasional. (Agung, 2018). Menurut teori keterkaitan ekonomi yang dikemukakan oleh Markusen dan Venables, Investasi Asing Langsung (FDI) memiliki potensi untuk menghasilkan efek *spillover*. Efek ini, pada gilirannya, mampu memperkuat sektor domestik di negara yang menerima investasi tersebut. (Markusen, R., Venables, & J., 1998).

Menurut Shabaz dkk. (2018), FDI membantu negara berkembang mengisi kekurangan modal dan mendorong sistem keuangan. Dalam jangka panjang, FDI dan pertumbuhan ekonomi saling memengaruhi; dalam jangka pendek, pasar modal mendorong pertumbuhan (Jamil, C., &, & Hayati, 2021) dalam Penelitian ini mengkaji investasi *Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)* di Sulawesi Selatan melalui pendekatan *Foreign Direct Investment (FDI)*. Investasi ini tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi, keahlian, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, mendorong konektivitas dan efisiensi ekonomi. Melalui konsep *spillover*, FDI MPTC berdampak pada sektor strategis seperti logistik, perdagangan, dan pariwisata. Penelitian ini juga membahas mekanisme, tantangan,

dan peluang investasi untuk mendukung percepatan pembangunan dan daya saing daerah.

3. **Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan kini menjadi fokus utama di banyak negara, karena menyeimbangkan kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Intinya, konsep ini menekankan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (Khan, Akhtar, S.M, Liu, & J.J, 2024). Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara ekonomi, keadilan sosial, dan lingkungan. Tujuannya memastikan pertumbuhan tidak merugikan masyarakat atau alam, dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, teknologi ramah lingkungan, dan partisipasi semua elemen masyarakat (Fu, Lu, & Pirabi, 2023). Pembangunan berkelanjutan bergantung pada SDM yang cerdas dan berintegritas. Indonesia perlu mengubah kekayaan alam menjadi investasi manusia agar terhindar dari “kutukan sumber daya”. Infrastruktur yang merata juga penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Muhammad, 2020). Pembangunan berkelanjutan membutuhkan kombinasi unsur penting, seperti SDM yang kompeten, infrastruktur memadai, serta lingkungan dan sumber daya alam yang terjaga dalam ekosistem yang kondusif (H.S, 2014). Ekonomi hijau adalah pendekatan strategis untuk mewujudkan pembangunan lestari,

dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Gambar 1.1

Kerangka Konseptual

Sumber: (Diolah oleh penulis)

Gambaran ini menguraikan hubungan antara kepentingan nasional, pembangunan berkelanjutan, dan peran investasi asing, dengan fokus pada keterlibatan *Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)* di Sulawesi Selatan. Pembangunan jalan tol strategis seperti Tol Layang AP Pettarani selaras dengan kepentingan nasional dalam memperkuat konektivitas dan daya saing. Karena keterbatasan anggaran, pemerintah mendorong skema *Foreign Direct Investment (FDI)*, seperti yang dilakukan MPTC melalui akuisisi PT Nusantara Infrastructure Tbk. Melalui FDI, MPTC tidak hanya membawa modal, tetapi juga keahlian manajemen dan teknologi, yang mendukung efisiensi distribusi,

pertumbuhan sektor logistik, serta penciptaan lapangan kerja. Investasi ini juga mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti efisiensi energi, emisi rendah, dan inklusivitas sosial. Secara keseluruhan, investasi MPTC berperan sebagai strategi pembangunan yang mendukung kepentingan nasional dan nilai-nilai keberlanjutan. Oleh karena itu, studi ini menggunakan tiga konsep utama Kepentingan Nasional, FDI, dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai kerangka analisis kontribusi MPTC terhadap pembangunan infrastruktur dan ekonomi Sulawesi Selatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti melalui penggambaran keadaan berdasarkan fakta empiris serta analisis terhadap argumen yang relevan dari data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi bentuk dan mekanisme investasi yang dilakukan oleh *Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)* dari Filipina dalam pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pendekatan kualitatif, penulis dapat menganalisis hubungan dan dinamika antara *Foreign Direct Investment (FDI)* dan pembangunan infrastruktur, serta menelaah lebih jauh bagaimana investasi

MPTC tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek lingkungan dan sosial, sejalan dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini juga menggali bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan mulai terintegrasi dalam praktik investasi asing di sektor infrastruktur, termasuk dalam konteks tantangan dan peluang yang dihadapi oleh MPTC dan anak perusahaannya di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan ruang untuk pemahaman holistik terhadap kontribusi investasi asing dalam pembangunan yang selaras dengan kepentingan nasional dan keberlanjutan jangka panjang.

2. **Jenis Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, seperti pimpinan perusahaan, pejabat pemerintah daerah, maupun pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam investasi infrastruktur oleh *Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)* di Sulawesi Selatan. Sementara itu, data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, artikel jurnal, laporan resmi, serta berbagai referensi relevan lainnya. Pemanfaatan data sekunder digunakan untuk mengidentifikasi pola, memperkuat temuan, dan memahami konteks historis serta teoritis yang mendukung analisis penelitian ini.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Studi kepustakaan (library research)**, yaitu teknik pengumpulan data sekunder melalui pencatatan, telaah literatur, dan analisis berbagai sumber tertulis, baik elektronik maupun non-elektronik, yang relevan dengan topik penelitian.
2. **Wawancara mendalam (in-depth interview)**, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung kepada informan kunci yaitu Pimpinan Perusahaan Pengelola Jalan Toll Makassar Bapak Ismail Malliungan bertempat di Menara Bosowa Lantai 4 Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar dan Mantan Pj. Walikota Makassar yang sekarang menjabat sebagai Anggota DPR RI Bapak Syamsu Rizal bertempat di Gedung Nusantara II DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel dan mendalam terkait bentuk investasi MPTC, proses implementasinya, serta dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal.
4. **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti bentuk dan mekanisme investasi MPTC, pengaruh investasi terhadap pembangunan infrastruktur, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan

gambaran yang jelas mengenai pola investasi infrastruktur dan perannya dalam pembangunan ekonomi regional. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada deskripsi yang mendalam terkait dinamika investasi MPTC di Sulawesi Selatan tanpa memperluas eksplorasi di luar cakupan penelitian

F. Sistematika Penulisan

Berikut adalah rancangan sistematika penulisan penelitian yang disusun dalam lima bab:

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang penelitian yang menjelaskan peran investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dalam pembangunan infrastruktur serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Selain itu, bab ini juga mengangkat pentingnya integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan investasi. Bab ini menguraikan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual yang mencakup tiga konsep utama, yaitu FDI, kepentingan nasional, serta pembangunan berkelanjutan serta metode penelitian yang digunakan.

BAB II Tinjauan Pustaka Bab ini membahas tinjauan literatur yang relevan dengan ketiga kerangka konseptual dalam penelitian, yakni FDI,

kepentingan nasional, dan pembangunan berkelanjutan. Bab ini juga menyoroti teori-teori pendukung, tiga konsep yakni Kepentingan Nasional, *Foreign Direct Investment* dan Pembangunan Berkelanjutan serta menyertakan penelitian terdahulu yang mendukung analisis dalam skripsi ini.

BAB III Gambaran Umum

Bab ini menyajikan gambaran umum yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan mencakup: Profil Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC): Uraian mengenai latar belakang perusahaan, ekspansi ke Indonesia, serta keterlibatannya dalam proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Kondisi Infrastruktur Sulawesi Selatan: Penjelasan mengenai posisi strategis provinsi, kebutuhan pengembangan infrastruktur, dan relevansinya dengan investasi asing. Kerangka Kerja Sama Regional ASEAN: Tinjauan atas kebijakan kawasan seperti AIA dan ACIA yang mendukung iklim investasi dan mendorong realisasi proyek lintas negara seperti yang dilakukan MPTC.

BAB IV Pembahasan

Bab ini membahas bagaimana MPTC dari Filipina menanamkan investasinya di sektor jalan tol Sulawesi Selatan, baik dari sisi bentuk, mekanisme, hingga struktur kepemilikan. Pembahasan juga mencakup skema pembiayaan proyek, relevansinya terhadap kepentingan nasional, serta dampak ekonominya bagi daerah. Di akhir, dijelaskan bagaimana

infrastruktur tol ini memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini merangkum hasil analisis dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bab ini memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pelaku investasi, khususnya dalam mendorong investasi infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan guna memperkuat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan dasar utama yang membentuk arah kebijakan suatu negara, baik dalam maupun luar negeri. Awalnya menitikberatkan pada isu keamanan, ekonomi, dan ideologi, konsep ini kini berkembang mencakup dinamika geopolitik dan perubahan global (Setiawan et al., 2024). Dalam Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Solechah dan Sugito (2022) menjelaskan bahwa kepentingan nasional juga berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya alam dan perlunya memperhatikan dampak lingkungan, demi menjamin kesejahteraan generasi mendatang.

Prinsip pembangunan berkelanjutan pun turut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan. Di Indonesia, kepentingan nasional tercermin dalam alinea keempat UUD 1945, yang menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan rakyat, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perdamaian dunia (Solechah & Sugito, 2022). Fokus utamanya adalah memastikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kepentingan nasional dapat kita pahami sebagai kebutuhan serta keinginan

fundamental sebuah negara berdaulat dalam menjalin interaksi dengan entitas berdaulat lainnya, yang mana pertimbangan lingkungan eksternal menjadi landasan utamanya. Definisi ini secara jelas menggambarkan perbedaan antara lingkungan eksternal dan internal suatu negara. Lingkungan internal diinterpretasikan sebagai kepentingan umum masyarakat domestik, sementara lingkungan eksternal mengacu pada berbagai pengaruh yang berasal dari sistem internasional. Prasetyo (2021) mengkategorikan kepentingan nasional ke dalam empat aspek utama yang saling terkait:

- 1) **Kepentingan Pertahanan:** Ini merujuk pada upaya untuk melindungi warga negara, menjaga keutuhan wilayah kedaulatan, serta mengantisipasi ancaman fisik dari negara lain atau gangguan eksternal terhadap sistem pemerintahan yang ada.
- 2) **Kepentingan Ekonomi:** Aspek ini berkaitan dengan tujuan negara dalam membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan negara lain, semata-mata demi meningkatkan kesejahteraan nasional
- 3) **Kepentingan Tatanan Dunia:** Hal ini mencerminkan komitmen untuk mempertahankan stabilitas sistem politik dan ekonomi global yang secara langsung mendukung kepentingan nasional.
- 4) **Kepentingan Ideologi:** Fokusnya adalah pada perlindungan

dan pelestarian nilai-nilai dasar yang diyakini oleh suatu bangsa sebagai prinsip universal, yang pada gilirannya membentuk identitas dan arah kebijakan negara. (Prasetyo, 2021).

Setiap negara secara konsisten berupaya menggenjot pembangunannya demi melancarkan berbagai aktivitas serta akses ekonomi masyarakatnya, dan Indonesia pun tak terkecuali. Tujuan utama pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Upaya pembangunan yang dilakukan saat ini merupakan strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan prinsip kepentingan nasional seperti yang dijelaskan Maryati dkk. dalam jurnal ekonomi dan bisnis (Kartiasih, 2019). Dalam bukunya yang berjudul *Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi Kepentingan Nasional dan Agenda Pembangunan Edisi ke-2* (2024), Rachmat Gobel menyoroti bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi panduan utama dalam merumuskan kepentingan nasional di sektor ekonomi.

Pasal tersebut memang menjadi fondasi bagi sistem pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Isinya secara tegas menyatakan bahwa struktur perekonomian harus dibangun berdasarkan asas kerakyatan. Ini menyiratkan bahwa sistem ekonomi wajib menjunjung tinggi prinsip demokrasi ekonomi, keadilan sosial, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, serta keseimbangan dalam kemajuan demi menjaga keutuhan bangsa. Menurut Gobel, kepentingan nasional yang sejati adalah terwujudnya sistem ekonomi yang adil dan benar-

benar berpihak pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, sesuai dengan semangat yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Jadi, kepentingan nasional kita adalah bagaimana kita bisa mewujudkan semangat Pasal 33 UUD 1945, yaitu menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan mengutamakan kemakmuran rakyat seluas-luasnya. (Shaleh & dkk, 2024) Menjaga dan mempertahankan kepentingan nasional adalah tugas kita bersama, seperti yang sudah diamanatkan dalam konstitusi. Tanggung jawab ini khususnya diemban oleh mereka yang diberikan amanah kekuasaan, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (Shaleh & dkk, 2024). Di era globalisasi yang pesat, tak ada negara yang bisa sepenuhnya terlepas dari dinamika global. Justru, memperkuat kerja sama antarnegara menjadi kunci dalam mewujudkan kepentingan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Karena itu, diplomasi kini tak lagi terbatas pada isu politik dan keamanan, melainkan juga menekankan pentingnya peran ekonomi dalam hubungan internasional (Shaleh & dkk, 2024). Menurut Jurnal Dinamika Global, diplomasi ekonomi mencakup berbagai aspek kepentingan nasional di bidang ekonomi, seperti perdagangan internasional, ekspor-impor, kerja sama ekonomi, serta perjanjian dagang dan investasi (Arystankulova, 2018). Diplomasi ekonomi dapat dipahami sebagai alat negara untuk menyampaikan dan mewujudkan kepentingannya melalui jalur diplomatik. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan mengelola potensi ekonomi demi mendukung kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat (Delanova, 2020). Kerja sama regional dan global memberi

Indonesia akses teknologi, peningkatan SDM, dan peluang ekonomi. Dengan menyeimbangkan kepentingan nasional dan kolaborasi internasional, Indonesia dapat mendorong pembangunan berkelanjutan (Salsabila, Najla, & Simajorang, 2023). Kerja sama regional sangat memengaruhi regulasi ekonomi Indonesia, terutama melalui harmonisasi kebijakan di ASEAN untuk menciptakan iklim usaha yang stabil. Namun, perbedaan kepentingan antarnegara menjadi tantangan, sehingga Indonesia harus mengelola dinamika ini dengan hati-hati agar kebijakan tetap selaras dengan kepentingan nasional sekaligus mendukung integrasi kawasan Asia Tenggara (Salsabila, Najla, & Simajorang, 2023). Kepentingan nasional mencakup keamanan, ekonomi, ideologi, dan lingkungan, menjadi dasar kebijakan dalam dan luar negeri. Di tengah perubahan global, negara harus merancang kebijakan yang tak hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek, tapi juga menjaga sumber daya dan kesejahteraan masa depan. Diplomasi ekonomi dan kerja sama regional sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi melalui teknologi, pertukaran pengetahuan, dan integrasi kawasan. Bagi Indonesia, pengelolaan dinamika global ini krusial demi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan kepentingan nasional.

B. *Foreign Direct Investmen*

Investasi adalah penanaman modal dengan harapan keuntungan di masa

depan, terbagi menjadi dua: investasi asing langsung (FDI) dan investasi asing tidak langsung (FII). FDI melibatkan penempatan modal pada aset nyata seperti pabrik, dengan investor aktif mengelola perusahaan. Sedangkan FII berupa pembelian saham atau obligasi tanpa keterlibatan langsung dalam manajemen. Sementara itu, DII (*Domestic Indirect Investment*) dan DDI (*Domestic Direct Investment*) merujuk pada jenis investasi yang dilakukan oleh investor yang berasal dari dalam negeri (Kholiza, Mulyandhani, & Arifah, 2024).

Investasi Asing Langsung (FDI) menjadi ciri penting ekonomi global saat ini karena dianggap lebih menguntungkan dibanding investasi ekuitas biasa. Investasi ekuitas biasanya bersifat jangka pendek dan mudah ditarik, yang dapat menyebabkan aliran modal keluar tiba-tiba dan meningkatkan kerentanan ekonomi (Kholiza, Mulyandhani, & Arifah, 2024). Dulu, pemerintah jadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dengan investasi langsung. Kini, perannya tidak bisa berjalan sendiri; partisipasi masyarakat dan terutama sektor swasta sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Mahadiansar, 2020). Menurut De Mello (1997) dalam Jurnal Struktur Ekonomi, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama: akumulasi modal dan transfer teknologi. Akumulasi modal mencakup peningkatan investasi pada infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusia yang meningkatkan kapasitas produksi negara (Fazaalloh, 2024). Investasi Asing Langsung (FDI) terbagi menjadi dua: inward, yaitu investasi dari luar yang masuk ke suatu negara, dan outward, yaitu investasi perusahaan domestik

ke luar negeri. FDI terjadi saat perusahaan menanam modal jangka panjang di negara lain, memberi pengaruh pada operasional perusahaan di negara tujuan. Selain faktor ekonomi, hubungan internasional menjadi kunci penting yang memengaruhi masuknya FDI ke suatu negara (Gangi, Ahmed, & Hassan., 2017).

FDI terbagi menjadi dua jenis: Brownfield dan Greenfield. Brownfield melibatkan akuisisi perusahaan lokal yang sudah ada, lebih hemat biaya dan cepat mengakses pasar domestik. Sedangkan Greenfield berarti membangun fasilitas baru di negara tujuan, memerlukan waktu dan biaya lebih besar, tapi berpotensi memberikan dampak ekonomi lokal yang lebih luas (Sumarto, 2017). Peneliti semakin menekankan peran penting hubungan internasional dalam menarik FDI lewat diplomasi ekonomi. Diplomasi ini memberikan informasi lengkap tentang iklim bisnis, mengurangi hambatan investasi, dan membangun kepercayaan antarperusahaan lintas negara. Kepercayaan ini menurunkan risiko politik, mendorong modal masuk, dan mempermudah ekspansi perusahaan multinasional. Selain itu, hubungan internasional membantu investor mengenali peluang yang menjanjikan, meningkatkan keyakinan dan potensi keuntungan mereka (Gangi, Ahmed, & Hassan., 2017).

Pemerintah sering terbatas anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga partisipasi swasta dan masyarakat sangat penting. Tantangan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya infrastruktur tak bisa diatasi hanya dengan dana negara. Oleh karena itu, investasi dari sektor

swasta dan masyarakat dibutuhkan, salah satunya lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memfasilitasi kolaborasi dengan investasi asing (FDI) maupun domestik (DDI) (Mahadiansar, Setiawan, Eki, & Kurniangsih, 2021). Melalui FDI, perusahaan dapat mengendalikan operasional bisnis di negara lain, tidak hanya secara teknis tetapi juga dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional perusahaan penerima investasi (Sentanu & Sri, 2015).

Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan Indonesia karena berperan penting dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Selain menarik investor baru, PMA juga memengaruhi iklim investasi secara keseluruhan, baik langsung maupun tidak langsung. Dampaknya luas, mulai dari sektor regional hingga nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengaruh internasional (Zohara, 2021). Menurut teori Neoklasik Tradisional, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas tenaga kerja, akumulasi modal lewat tabungan dan investasi, serta kemajuan teknologi. Penelitian Putu dan Setyari (2015) serta Lubis (2014) menunjukkan bahwa FDI dan tenaga kerja secara positif dan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi (Anom, Malik, & Wahyudi, 2019). Indonesia menarik Penanaman Modal Asing (PMA) berkat kekayaan sumber daya alamnya, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Pengembangan sektor ini lewat PMA dapat meningkatkan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja baru, yang tak hanya mendukung

pertumbuhan ekonomi nasional tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah (Rahman, Ahmad, Soelistyo, & Hadi, 2016). Menurut Zaenuddin (2009) dalam Jurnal Manajemen, investasi asing berperan penting dalam mengatasi neraca pembayaran dan inflasi. Kontribusi ini memperkuat sektor usaha negara dan swasta domestik (Dewi & Triaryati, 2015). Pertumbuhan PDB yang kuat juga menarik minat investor untuk menanamkan modal (Shahzad, 2013).

Penelitian Awan (2011) di Pakistan menunjukkan bahwa PDB berhubungan positif dan signifikan dengan arus masuk FDI, artinya pertumbuhan ekonomi meningkatkan daya tarik bagi investor asing. Studi Sarwedi (2002) juga mendukung temuan ini, menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang stabil dan tumbuh menjadi magnet bagi investasi asing (Dewi & Triaryati, 2015). Menurut IMF dan OECD, investasi asing dikategorikan sebagai Foreign Direct Investment (FDI) jika investor asing memiliki minimal 10% saham atau hak suara di perusahaan tujuan. Batas ini membedakan FDI dari investasi asing tidak langsung (FII), karena kepemilikan di atas 10% memberi pengaruh signifikan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. FDI bisa berupa modal penuh asing atau kemitraan dengan perusahaan lokal. Di sektor riil, FDI biasanya meliputi akuisisi perusahaan, pembangunan pabrik baru, serta pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan usaha (Aslam, 2023). Berdasarkan laporan *World Investment Report 1998* yang diterbitkan oleh UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and*

Development), ada tiga faktor utama yang memengaruhi masuknya Investasi Asing Langsung (FDI) ke sebuah negara:

- 1) Kerangka Kebijakan: Suatu negara memegang peranan sentral. Ini mencakup sejauh mana stabilitas ekonomi dan politik terjaga, bagaimana kebijakan perdagangan diterapkan, sistem perpajakan yang berlaku, hingga kebijakan privatisasi aset-aset negara. Keseluruhan kerangka ini akan membentuk lingkungan yang kondusif atau sebaliknya, menghambat bagi masuknya investasi asing..
- 2) Faktor Ekonomi: Aspek-aspek seperti ukuran dan potensi pertumbuhan pasar domestik, ketersediaan sumber daya alam, efisiensi biaya produksi, serta keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi pertimbangan utama. Semua faktor ini secara kolektif menentukan seberapa menarik suatu negara di mata investor asing..
- 3) Fasilitasi Bisnis: fasilitasi bisnis berperan penting dalam meningkatkan daya saing negara. Ini meliputi kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha, efisiensi birokrasi, serta dukungan nyata dari pemerintah berupa insentif dan layanan bagi para investor. Fasilitasi bisnis yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya (Fadhilah, 2020).

Teori OLI (Ownership, Location, Internalization), atau paradigma eklektik, dikembangkan oleh John H. Dunning pada 1988. Teori ini menjelaskan motivasi utama perusahaan melakukan investasi langsung luar negeri (FDI) dengan menyoroti tiga keunggulan utama yang mendorong ekspansi internasional:

- 1) Keunggulan Kepemilikan (*Ownership Advantage*): Ini merujuk pada aset atau kemampuan istimewa yang dimiliki sebuah perusahaan. Bisa berupa teknologi mutakhir, kekuatan merek dagang yang sudah dikenal luas, atau bahkan keahlian manajerial yang superior. Semua ini memberikan perusahaan keunggulan kompetitif yang jelas dibanding pesaingnya di pasar global.
- 2) Keunggulan Lokasi (*Location Advantage*): Ini adalah manfaat yang didapatkan saat sebuah perusahaan beroperasi di lokasi geografis tertentu. Keunggulan ini bisa berupa kemudahan akses ke sumber daya alam yang melimpah, ketersediaan tenaga kerja dengan biaya kompetitif, atau kedekatan dengan pasar konsumen yang besar. Penting untuk dicatat, keunggulan lokasi ini tersedia bagi semua investor yang memilih untuk beroperasi di tempat tersebut.
- 3) Keunggulan Internalisasi (*Internalization Advantage*): Aspek ini menjelaskan mengapa perusahaan lebih memilih untuk mengelola dan mengendalikan langsung operasinya di pasar luar negeri, alih-alih melalui perjanjian lisensi atau kemitraan dengan pihak lain.

Tujuannya adalah untuk menghindari biaya transaksi yang mungkin muncul, melindungi hak kekayaan intelektual mereka, serta memastikan kualitas dan konsistensi produk atau layanan yang ditawarkan tetap terjaga (Fadhilah, 2020).

Teori OLI menawarkan kerangka kerja yang menyeluruh untuk memahami alasan serta mekanisme perusahaan terlibat dalam Investasi Asing Langsung (FDI). Teori ini mempertimbangkan kombinasi dari tiga keunggulan yang menjadi pendorong utama. Menurut Dunning (1988), ada tiga motif mendasar yang mendorong investor asing untuk melakukan FDI ke negara lain:

- 1) **pencarian sumber daya (*Resource Seeking*)**: Di sini, investor mencari lokasi yang bisa menawarkan sumber daya alam, bahan baku, tenaga kerja terampil, atau infrastruktur dengan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan negara asal mereka. Intinya, mereka ingin mendapatkan input produksi yang lebih efisien.
- 2) **pencarian pasar (*Market Seeking*)**: Jenis investasi ini dilakukan untuk masuk ke pasar baru atau menjaga pangsa pasar yang sudah ada. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan produk atau layanan yang mereka tawarkan
- 3) **pencarian efisiensi (*Efficiency Seeking*)**: Investor yang memiliki motif ini berupaya mencapai efisiensi ekonomi yang maksimal. Caranya adalah dengan memanfaatkan skala ekonomi, spesialisasi

produksi, dan biaya produksi yang lebih rendah di negara tujuan investasi. Dengan begitu, perusahaan bisa meningkatkan daya saing mereka dan tentu saja, profitabilitas.

Motif-motif ini menunjukkan bagaimana perusahaan secara strategis memanfaatkan berbagai kesempatan di kancah internasional. Tujuannya jelas, yakni memperkuat kedudukan kompetitif mereka di pasar global yang semakin dinamis (Fadhilah, 2020). Selain teori OLI dari Dunning, Stephen Hymer pada 1960-an mengajukan Teori Keunggulan Monopolistik. Ia menyatakan bahwa FDI lebih sering terjadi pada industri oligopolistik, di mana perusahaan asing memiliki keunggulan yang sulit ditiru oleh perusahaan lokal. Keunggulan tersebut bisa berupa skala ekonomi, teknologi, pengetahuan pasar, atau kemampuan manajerial dan finansial. Intinya, FDI muncul sebagai respons terhadap ketidaksempurnaan pasar (Wage, 2020). Teori internalisasi menjelaskan bahwa perusahaan multinasional memilih mendirikan anak usaha di luar negeri untuk melindungi aset intelektual dan menghindari risiko pasar, dibanding melisensikan pengetahuan ke pihak lain. Ini menjaga kontrol dan keunggulan kompetitif (Wage, 2020).

Dengan demikian Investasi merupakan penanaman modal untuk memperoleh keuntungan, yang secara umum terbagi menjadi investasi langsung (seperti FDI dan DDI) dan tidak langsung (seperti FII dan DII). FDI, sebagai bentuk investasi langsung, memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan modal, transfer teknologi, dan

penguatan infrastruktur. Untuk menarik FDI, diperlukan kebijakan yang stabil dan iklim usaha yang kondusif. Dalam konteks pembangunan modern, peran pemerintah kini didukung oleh kolaborasi lintas sektor, termasuk swasta dan masyarakat, guna mengatasi keterbatasan anggaran. Keberhasilan FDI juga dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi, kebijakan yang mendukung, serta hubungan internasional yang baik melalui diplomasi ekonomi. Berbagai teori seperti OLI, keunggulan monopolistik, dan internalisasi menjelaskan motivasi perusahaan dalam melakukan FDI, baik untuk mencari sumber daya, memperluas pasar, maupun menekan biaya. Dengan demikian, FDI turut memperkuat daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan.

Tabel 2.1

Perbedaan Foreign Direct Investment dan Foreign Indirect Investment

Aspek	FDI (Foreign Direct Investment)	FII (Foreign Indirect Investment)
Definisi	Investasi langsung oleh entitas asing dalam bentuk kepemilikan saham perusahaan atau aset produktif	Investasi oleh lembaga keuangan asing dalam bentuk instrumen pasar modal (saham/obligasi)
Bentuk Investasi	Akuisisi, joint venture, pembangunan pabrik (greenfield), atau pengambilalihan (brownfield)	Pembelian saham, obligasi, dan sekuritas lainnya di pasar keuangan
Kepemilikan Saham	Minimal 10% saham perusahaan untuk dikategorikan sebagai FDI	Kurang dari 10% saham perusahaan, bersifat minoritas dan tidak mengontrol

Kontrol Manajerial	Umumnya disertai kontrol terhadap manajemen dan operasional perusahaan	Tidak memiliki kontrol manajemen, bersifat pasif
Tujuan Investasi	Jangka panjang, membangun kehadiran bisnis permanen di negara tujuan	Jangka pendek hingga menengah, mencari keuntungan dari pergerakan pasar
Pengaruh Ekonomi	Berpengaruh langsung pada lapangan kerja, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi	Lebih berpengaruh pada pasar modal dan volatilitas pasar keuangan
Komitmen Modal	Tinggi dan stabil, karena mencakup aset fisik dan operasional	Relatif rendah, karena dapat ditarik dengan cepat
Risiko bagi Negara Tuan Rumah	Lebih rendah dari sisi volatilitas karena investasi jangka panjang	Lebih tinggi karena mudah keluar masuk, bisa menyebabkan fluktuasi nilai tukar

Sumber : (Aslam, 2023)

C. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dikenal luas sejak tahun 1987 melalui laporan Brundtland, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland. Inti dari konsep ini adalah bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Pandangan ini mengubah paradigma pembangunan yang sebelumnya sering memisahkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kini, keduanya dipandang saling melengkapi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kapasitas negara dalam menjaga lingkungan, sementara lingkungan yang terjaga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Suparmoko,

2020). Konsep pembangunan berkelanjutan mencuat setelah terbitnya Brundtland Report pada 1987, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi berfokus pada pertumbuhan yang efisien dan inovatif, keberlanjutan sosial menyoroti pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, sementara keberlanjutan lingkungan menuntut pelestarian sumber daya alam dan penggunaan energi terbarukan (Tarumingkeng, 2025). Namun, di Indonesia, implementasi konsep ini masih terkendala oleh ketiadaan tolok ukur yang jelas untuk masing-masing dimensi. Padahal, standar yang eksplisit sangat diperlukan agar pembangunan berkelanjutan benar-benar mampu menjawab tantangan nyata dan mencerminkan aspirasi masyarakat

Menurut Abdoellah (2007:83–87), indikator-indikator yang perlu dipergunakan mencakup:

- 1) **Pro-Negara Kesatuan Republik Indonesia:** Setiap upaya pembangunan harus senantiasa memperkuat keutuhan, kedaulatan, dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) **Pro-Lingkungan Hidup:** Pembangunan wajib dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian alam dan ekosistem, memastikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
- 3) **Pro-Rakyat Miskin:** Pembangunan harus berpihak pada kelompok masyarakat rentan dan miskin, dengan fokus pada peningkatan

kesejahteraan serta pemerataan akses terhadap sumber daya.

- 4) **Pro-Kesetaraan Gender:** Proses pembangunan harus menjamin kesetaraan kesempatan dan perlakuan adil bagi semua gender, menghapus diskriminasi, dan memberdayakan perempuan
- 5) **Pro-Lapangan Pekerjaan:** Pembangunan bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak dan produktif, guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 6) **Anti-Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme:** Pembangunan dilaksanakan berdasarkan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme demi tata kelola yang bersih. (Mulyadi, et al., 2015)

Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur terintegrasi karena dampaknya yang luas, termasuk pada sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mempercepatnya, Indonesia mengandalkan pendanaan asing seperti hibah, pinjaman lunak, dan bantuan teknis, yang juga menjadi cara negara maju membantu pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Putri & A.M, 2024). Dalam jurnal Institut Sosial dan Manajemen, Emil Salim (1990) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia, sekaligus menciptakan pemerataan antar generasi. Tujuannya mencakup pemerataan manfaat pembangunan,

pelestarian sumber daya alam, dan pengelolaan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Strateginya meliputi keadilan sosial, penghargaan terhadap keanekaragaman, pendekatan integratif, dan visi pembangunan jangka panjang (Rahadian, 2016) Salah satu tantangan terpenting dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Ini adalah dilema krusial yang harus kita hadapi (Fauzi, 2024). dalam konteks ini, Teori Keberlanjutan Ekonomi menyoroti pentingnya reformasi struktural dan kebijakan nasional untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil dan efisien. Tiga unsur utama yang menjadi fokus adalah pemerataan kekayaan, kemakmuran berkelanjutan, dan efisiensi ekonomi. Untuk mencapainya, dapat diterapkan berbagai kebijakan makro seperti reformasi fiskal, efisiensi sektor publik, peningkatan tabungan domestik, penguatan pasar, serta pengembangan SDM dan pemerataan aset (Sabilla, Fathiha, & Rahmadhini, 2025).

Teori pembangunan berkelanjutan juga dapat ditinjau dari perspektif Ekonomi Politik Internasional (EPI) Maiwan, yang menekankan hubungan timbal balik antara kekayaan dan kekuasaan antarnegara. Dalam pendekatan ini, aspek ekonomi dan politik tidak dipisahkan karena saling memengaruhi secara dinamis, baik melalui pasar maupun peran negara. Sejak Revolusi Industri abad ke-16, faktor seperti tenaga kerja, pasar, sumber daya, dan teknologi menjadi bagian integral dari sistem global (Maiwan, 2015). Dr. Mohtar Mas'ood menambahkan bahwa EPI mengkaji interaksi kompleks ekonomi dan politik di

tingkat global, termasuk dalam isu bantuan luar negeri. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, bantuan asing berperan penting dalam mendukung pembangunan karena keterbatasan anggaran domestik (Putri & A.M, 2024). Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri hadir sebagai respons terhadap krisis lingkungan global, dengan menekankan keseimbangan antara aktivitas manusia dan alam. Keraf menyebutnya sebagai paradigma pembangunan global, sementara Panayotou menekankan pentingnya keterkaitan antara ekonomi dan ekologi dalam wacana ini (Rosana, 2018) Menurut Rudy C. Tarumingkeng, pembangunan berkelanjutan membutuhkan integrasi erat dengan kebijakan ekonomi makro agar tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan jangka panjang. Hal ini tercermin dalam kebijakan fiskal yang pro-lingkungan, kebijakan moneter yang mendorong pembiayaan proyek berkelanjutan, serta stabilitas ekonomi sebagai fondasi utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkesinambungan (Tarumingkeng, 2025) Investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Jika dikelola dengan tepat, investasi dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi, termasuk dalam teknologi ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan sendiri bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan, dengan menekankan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang.

Meski prinsip ini telah diterima di Indonesia, penerapannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal tolok ukur dan integrasi kebijakan. Karena itu, peran ekonomi makro, investasi, dan kerja sama global menjadi kunci untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Penelitian terdahulu

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah melakukan tinjauan pustaka (literature review) terhadap empat penelitian terdahulu. Keempat studi tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan topik utama yang saya angkat, yaitu **“Peran Investasi Asing dalam Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Pembangunan Ekonomi”**. Pertama penelitian yang berjudul ***“Analisis Dampak Investasi Asing Langsung terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”*** bertujuan untuk menganalisis dampak investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/*FDI) terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jacob, Hamid, Buhang, Ladjin, & Zakaria, 2024) . Dalam studi yang telah dilakukan, peneliti menekankan bahwa pembangunan infrastruktur adalah komponen krusial pendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia yang kerap menghadapi keterbatasan modal domestik. Dengan menerapkan metode regresi dan menganalisis data sekunder menggunakan *software* SPSS, hasil riset ini secara jelas menunjukkan bahwa

investasi asing langsung (FDI) memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur. FDI dinilai berkontribusi tidak hanya dalam bentuk suntikan modal finansial, tetapi juga melalui transfer teknologi dan keahlian manajemen, yang pada akhirnya mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur. Berdasarkan temuan ini, penelitian tersebut menyimpulkan beberapa poin penting: Penanaman modal asing terbukti memiliki hubungan positif dengan pembangunan infrastruktur. Hal ini konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan daya tarik investasi langsung di suatu wilayah, sebab kondisi tersebut tidak akan membebani biaya produksi tambahan bagi investor. Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur di Indonesia selama lima tahun terakhir terus menunjukkan progres signifikan, ditandai dengan penambahan jaringan jalan tol, peningkatan kapasitas pelabuhan dan bandara, serta ketersediaan pasokan listrik yang lebih baik. Semua capaian ini menjadi faktor pendukung kuat bagi masuknya investasi asing ke Tanah Air. Penelitian yang saya lakukan ini memiliki relevansi kuat dengan studi sebelumnya mengenai investasi asing oleh Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) di Sulawesi Selatan. Dalam konteks tersebut, MPTC, sebagai entitas investor asing, telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan tol. Proyek ini tidak sekadar meningkatkan konektivitas antarwilayah, namun juga menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Temuan ini selaras dengan studi-studi terdahulu, yang secara konsisten

menunjukkan bahwa peran Investasi Asing Langsung (FDI) dalam pengembangan infrastruktur merupakan instrumen krusial dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun regional.

Penelitian Kedua, penelitian yang berjudul ***“Strategi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Analisis Bantuan Luar Negeri Jepang dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”*** oleh (Putri A. M., 2024), dipublikasikan dalam Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1 No. 2. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, didukung oleh metode studi pustaka (*library research*). peneliti menggunakan teori interdependensi sebagai kerangka utama untuk menganalisis relasi antara negara donor dan penerima bantuan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kontribusi bantuan luar negeri Jepang, khususnya melalui skema *Official Development Assistance (ODA)*, berdampak pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peneliti secara spesifik mengkaji peran Jepang sebagai salah satu negara donor utama dalam berbagai proyek strategis di Indonesia. Contohnya termasuk pembangunan MRT Jakarta, pengembangan jalan tol, dan modernisasi bandara. Selain itu, peneliti juga menelaah kontribusi Jepang dalam transfer teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia. Bantuan ini tidak hanya memicu

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia, tetapi juga secara jelas menunjukkan dinamika ketergantungan Indonesia terhadap Jepang, terutama dalam aspek pendanaan dan formulasi kebijakan pembangunan. Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian yang penulis teliti penelitian tersebut secara bersamaan menyoroti keterlibatan pihak asing dalam pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia. Lebih jauh, ia menganalisis bagaimana kerja sama bilateral ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi serta arah kebijakan nasional. Di samping itu, pembahasan ini juga memberikan sudut pandang krusial terkait peran aktor internasional, yaitu Jepang, dalam membentuk jalur pembangunan Indonesia melalui mekanisme bantuan luar negeri yang bersifat strategis dan berjangka panjang

Penelitian ketiga berjudul “*Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*” yang dilakukan oleh (Isnainul, Pakpahan, Hadlen, Danniell, & Violita, 2020) dalam jurnal Jatiswara Vol. 35 No. 3 Tahun 2020, Penelitian ini memiliki kesamaan fokus dalam mengkaji bagaimana investasi asing berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi ini terwujud, terutama, melalui peningkatan kualitas infrastruktur, kemajuan teknologi, penciptaan peluang kerja baru, serta peningkatan pendapatan negara. Dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikan metode yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa investasi asing berpotensi besar untuk

mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur strategis. Namun, hal ini hanya dapat tercapai apabila didukung oleh beberapa faktor kunci: regulasi yang jelas, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, kemudahan dalam proses perizinan, dan adanya insentif yang memadai dari pemerintah. Meskipun demikian, studi ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang sering dihadapi. Beberapa di antaranya meliputi kompleksitas birokrasi, isu terkait pembebasan lahan, serta belum optimalnya kepastian hukum bagi para investor asing. penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, khususnya mengenai peran *Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)* sebagai investor asing dari Filipina dalam pengembangan infrastruktur jalan tol di Sulawesi Selatan. Kehadiran MPTC sendiri merupakan representasi dari investasi asing langsung (FDI), yang secara nyata memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penelitian ini sebelumnya, pembangunan infrastruktur yang didorong oleh FDI terbukti mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terjadi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan kemudahan aksesibilitas antar daerah. Dengan demikian, penelitian terdahulu tersebut semakin memperkuat argumen bahwa investasi asing, seperti yang diimplementasikan oleh MPTC, dapat berfungsi sebagai katalisator utama dalam akselerasi pembangunan ekonomi. Tentu saja, kondisi ini mensyaratkan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang pro-investasi serta lingkungan

hukum yang stabil dan kondusif.

Penelitian keempat berupa jurnal yang berjudul ***“Peran Penanaman Modal Asing dalam Membangun Perekonomian di Indonesia”*** oleh (Jihan, et al., 2022) dalam *Journal of Social Research* Vol. 1 No. 3 Penelitian ini mengulas secara menyeluruh bagaimana investasi asing memberikan kontribusinya nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Fokus utamanya meliputi peran investasi dalam perbaikan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan devisa negara. Untuk mencapai pemahaman yang mendalam, studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai penelitian sebelumnya. Hasil utama yang ditemukan menunjukkan bahwa penanaman modal asing (PMA) memiliki dampak signifikan pada pembangunan infrastruktur, yang notabene merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, penelitian ini menyoroti bahwa kehadiran FDI (Foreign Direct Investment) di Indonesia turut membuka peluang kolaborasi yang berharga antara perusahaan asing dan UMKM lokal. Ini juga mendorong modernisasi dalam aspek manajerial dan teknologi. Namun, perlu dicatat bahwa studi ini juga menyadari adanya beberapa risiko. Di antaranya adalah potensi dominasi perusahaan multinasional terhadap pasar lokal, serta kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini relevan dengan penilitan penulis mengenai peran *Metro Pacific Tollways Corporation* (MPTC) sebagai investor asing dalam proyek pembangunan jalan tol di Sulawesi Selatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal tersebut, investasi asing memainkan peran strategis dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya bila didukung dengan regulasi yang kondusif dan partisipasi lokal yang kuat.